

2025 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

**INFORMASI DOKUMEN TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN
 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN TOL, SISTEM CCTV LALU LINTAS,
 SISTEM VMS, DAN JARINGAN FIBER OPTIK PADA JALAN TOL BETUNG – TEMPINO II –
 SIMPANG NESS**

Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Jalan Tol Penugasan PT Hutama Karya (Persero) yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor: 1472/KPTS/22/IV/2022, beberapa item dokumen berikut **tidak diberlakukan** pada pengadaan paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Sistem CCTV Lalu Lintas, Sistem VMS, dan Jaringan Fiber Optik pada Jalan Tol Betung–Tempino II–Simpang Ness, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Item	Keterangan
1.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Tidak dipersyaratkan untuk paket pengadaan pekerjaan non-konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera.
2.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Tidak dipersyaratkan untuk paket pengadaan pekerjaan non-konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera.
3.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	Tidak terdapat sanggah atau banding terhadap proses pengadaan dari peserta tender.
4.	Surat Jaminan Pemeliharaan;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultasi perencanaan.
5.	Surat Perintah Pencairan Dana;	Dalam proses pembayaran pada paket pengadaan di Hutama Karya, tidak diperlukan Surat Perintah Pencairan Dana karena seluruh proses pembayaran dilakukan otomatis dan terpusat oleh Bagian Keuangan Hutama Karya setelah adanya tagihan yang masuk.

Informasi ini menjadi bagian dari komitmen PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan proses pengadaan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku guna menjamin kesuksesan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur nasional.

Jakarta, 24 September 2025
 PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Sekretaris Perusahaan



[Signature]
Adjib Al Hakim
Executive Vice President
C.q Atasan PPID

INFORMASI DOKUMEN TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) JALAN TOL RUAS DUMAI – RANTAUPRAPAT PAKET 5 STA 107+500 S/D STA 146+550

Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Jalan Tol Penugasan PT Hutama Karya (Persero) yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor: 1472/KPTS/22/IV/2022, beberapa item dokumen berikut **tidak diberlakukan** pada pengadaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol Ruas Dumai – Rantau Prapat Paket 5 STA 107+500 s/d STA 146+550, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Item	Keterangan
1.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Tidak dipersyaratkan untuk paket pengadaan pekerjaan non-konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera.
2.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Tidak dipersyaratkan untuk paket pengadaan pekerjaan non-konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera.
3.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	Tidak terdapat sanggah atau banding terhadap proses pengadaan dari peserta tender.
3.	Surat Jaminan Pelaksanaan;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan.
4.	Surat Jaminan Uang Muka;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan.
5.	Surat Jaminan Pemeliharaan;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan.
6.	Surat Perintah Membayar;	Tidak dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana;	Dalam proses pembayaran pada paket pengadaan di Hutama Karya, tidak diperlukan Surat Perintah Pencairan Dana karena seluruh proses pembayaran dilakukan otomatis dan terpusat oleh Bagian Keuangan Hutama Karya setelah adanya tagihan yang masuk.

Informasi ini menjadi bagian dari komitmen PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan proses pengadaan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku guna menjamin kesuksesan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur nasional.

Jakarta, 24 September 2025

PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Sekretaris Perusahaan



 **Adjib Al Hakim**
Executive Vice President
C.q Atasan PPID